

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG
Tahun Anggaran 2022**

PADANG PANJANG, 2022

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Sistematika Penulisan.....	2
BAB II	EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TRIWULAN II TAHUN 2022	4
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD	4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
	2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2022	20
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	31
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	32
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	32
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	37
	3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	40
BAB V	PENUTUP	48

6.2.	Strategi, Arah Kebijakan dan Program pada Misi 2: Meningkatkan Pemerataan kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	VI	11
6.2.1.	Strategi pada Misi 2.....	VI	11
6.2.2.	Arah Kebijakan pada Misi 2.....	VI	13
6.2.3.	Program Pembangunan pada Misi 2.....	VI	19
6.3.	Strategi, Arah Kebijakan dan Program pada Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif.....	VI	20
6.3.1.	Strategi pada Misi 3.....	VI	20
6.3.2.	Arah Kebijakan pada Misi 3.....	VI	22
6.3.3.	Program Pembangunan pada Misi 3.....	VI	24
6.4.	Fokus/ Tema Pembangunan.....	VI	31
6.5.	Program Pembangunan Daerah untuk Pencapaian Visi dan Misi Padang Panjang 2018 – 2023	VI	34
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII	1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII	1
8.1.	Indikator Kinerja Makro.....	VIII	1
8.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VIII	5
BAB IX	PENUTUP	IX	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal dianggap perlu, biasanya terkait dengan penyesuaian anggaran dan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan, OPD dapat menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja, yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu Indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Setelah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah maka Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai salah satu OPD yang membawahi 2 (dua) urusan wajib, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup, pada saat ini juga menyiapkan Perubahan Renja Tahun 2022 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada penyesuaian kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Padang Panjang.

1.2. DASAR HUKUM

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021;
 10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
 11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023;
 13. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Memastikan tercapainya prioritas pembangunan Tahun 2022 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2021.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Bab V Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi Renja pada prinsipnya merupakan evaluasi untuk melihat tingkat capaian target sampai dengan Triwulan II. Dari program dan kegiatan Tahun 2022 yang telah sempat direalisasikan, apakah memenuhi target atau tidak, serta faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat capaian tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diputuskan apakah program kegiatan dimaksud perlu dilakukan perubahan/penyesuaian, baik dalam bentuk kegiatan, target dan anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya perlu diperhitungkan apakah kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh kemampuan keuangan daerah yang ada saat ini.

Dengan mempertimbangkan gambaran sebagaimana tersebut diatas, maka Tabel 2.1. berikut ini disajikan untuk mengevaluasi tingkat capaian Renja 2022 sampai dengan Triwulan II dan rasionya terhadap target sampai tahun terakhir periode Renstra (Tahun 2023).

Dari Tabel dibawah dapat dilihat bahwa terdapat beberapa Sub Kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan target, diantaranya :

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana, belum bisa dilaksanakan karena belum rekening di DPA nya belum by name by address.
2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, belum bisa dilaksanakan karena menunggu MoU dengan pihak Bank terkait pencairan dana nya.
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengeloan Keanekaragaman Hayati, pelaksanaannya belum sesuai target karena menyesuaikan jadwal dengan Tenaga Ahli.
4. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, pelaksanaan belum sesuai target karena menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sedangkan untuk indikator Sasaran dan Program, sebagian besar baru dapat dihitung pada akhir tahun 2022.

Tabel 2.1.
Evaluasi terhadap Hasil Renja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2019 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab							
										I	II	III	IV												
1	2	3	4	5		6		7		8-11				12	13=6+12		14=13/5x100%	15							
		DINAS PERKIM LH			137,489,037,966		51,213,100,976		24,088,635,580		2,624,105,730		4,767,536,658		-		-	7,391,642,388		58,604,743,364		42.63			
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	100%	6,542,172,650	90%	1,194,719,800	73.59%	1,063,498,800		1,150,000		20,854,950		-		-	22,004,950	73.59%	1,216,724,750	73.59%	18.60	Bidang Perkim		
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	1 Dokumen				1 Dokumen	49,999,900										-		-		0.00		
		Penyusunan/Reviu/Legalisasi/ Kebijakan Bidang PKP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000			10 Kali	49,999,900			-							-		-		0.00		
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	20 kali	215,188,650	12 kali	101,735,150	10 kali	113,498,900	3 kali	1,150,000	3 kali	20,854,950						3 kali	22,004,950	18 kali	123,740,100	15 kali	57.50	
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	20 Kali	215,188,650	12 kali	101,735,150	12 kali	113,498,900	3 kali	1,150,000	3 kali	20,854,950						3 kali	22,004,950	18 kali	123,740,100	15 kali	57.50	
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)	299 unit	6,326,984,000	52 unit	1,092,984,650	85 unit, 10 kali	900,000,000		-							-	52 unit	1,092,984,650	52 unit	17.27			
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang direhab (APBD)	299 Unit	6,326,984,000	52 unit	1,092,984,650	85 unit	900,000,000		-							-	52 unit	1,092,984,650	52 unit	17.27			

		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Persentase keterediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	100%	19,368,811,808		412,593,000	88%	6,017,249,000	58,013,000	291,535,313						349,548,313	86%	762,141,313	86%	3.93	Bidang Perkim		
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran, Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman, Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan), Persentase saluran drainase teknis (konstruksi beton)	2 keca matan,	19,368,811,808	2 keca matan	412,593,000	2 keca matan,15 lokasi sarana Jalan setapak, 10 DAM, 7 Drai nase	6,017,249,000	2 keca matan	58,013,000	2 keca matan	291,535,313		2 keca matan		349,548,313	2 keca matan	762,141,313	2 keca matan	3.93			
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	2 keca matan	19,368,811,808	2 keca matan	412,593,000	2 keca matan,15 lokasi sarana Jalan setapak, 10 DAM, 7 Drai nase	6,017,249,000	2 keca matan	58,013,000	2 keca matan	291,535,313		2 keca matan		349,548,313	2 keca matan	762,141,313	2 keca matan	3.93			
		PORGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	PSU kawasan Permukiman yang Sesuai Standar	18.16%	10,028,058,938	18.16%	10,007,827,168		-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.16%	10,007,827,168	18.16%	99.80	Bidang Perkim		
		Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	Jumlah Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permu kiman	39 lokasi	3,428,521,606	39 lokasi	3,428,521,606											-	39 lokasi	3,428,521,606	39 lokasi	100.00		
		Kegiatan Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yg dilengkai dengan Banguna Pengaman	27 lokasi	2,711,543,832	27 lokasi	2,711,543,832												-	27 lokasi	2,711,543,832	27 lokasi	100.00	
		Kegiatan Bangunan Drainase Lingkungan Permukiman	Jumlah Bangunan Drainase Lingkungan Permukiman	33 lokasi	3,076,599,500	33 lokasi	3,076,599,500												-	33 lokasi	3,076,599,500	33 lokasi	100.00	
		Kegiatan Pemeliharaan Prasara Permukiman	Jumlah Pemeliharaan Prasara Permukiman (Jalan,DAM dan Drainase)	2 Kecamatan	614,644,000	2 Kecamatan	614,644,000												-	2 Kecamatan	614,644,000	2 Kecamatan	100.00	
		Kegiatan BOP Kotaku	Pengurangan Kawasan Kumuh	10 Ha	196,750,000	10 Ha	176,518,230												-	10 Ha	176,518,230	10 Ha	89.72	
2	Meningkatkan Keterediaan Rumah Huni Bagi Masyarakat	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Permukiman layak Huni	97.90%	778,701,404	97.90%	212,877,436	96.21%	310,295,580	36,418,324	60,127,816						96,546,140	94.96%	309,423,576	94.96%	39.74	Bidang Perkim		
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehab dan Di Bangun	10 Unit	778,701,404	10 Unit	212,877,436	5 Unit	50,509,000	250,000	580,000						830,000		213,707,436		27.44			

	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehab dan di Bangun	10 Unit	291,018,000	10 Unit	-	5 Unit	50,509,000	250,000	580,000								830,000	830,000	0.29				
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Hunian Rusunawa yang di Kelola	72 Hunian, 6 Orang		72 Hunian, 6 Orang		72 Hunian, 6 Orang	259,786,580	72 Hunian, 6 Orang	36,168,324	72 Hunian, 6 Orang	59,547,816						95,716,140	72 Hunian, 6 Orang	95,716,140	72 Hunian, 6 Orang	0.00		
	Sum Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Hunian Rusunawa yang di Kelola dan Jumlah Tenaga Harian Lepas yang Dibayarkan	72 Hunian, 6 Orang	778,701,404	72 Hunian, 6 Orang	212,877,436	72 Hunian, 6 Orang	259,786,580	72 Hunian, 6 Orang	36,168,324	72 Hunian, 6 Orang	59,547,816						95,716,140	72 Hunian, 6 Orang	308,593,576	72 Hunian, 6 Orang	39.63		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	95%	9,409,718,051	94.12%	318,144,672													94.12%	318,144,672	94.12%	3.38	Bidang Perkim	
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian, 400 unit	9,409,718,051	72 hunian	318,144,672													72 hunian	318,144,672	72 hunian	3.38		
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian, 400 unit	9,409,718,051	72 hunian	318,144,672													72 hunian	318,144,672	72 hunian	3.38		
	PROGRAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	92.65%	695,794,672		484,699,994														92.65%	484,699,994	92.65%	69.66	Bidang Perkim
	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Rusunawa	Jumlah Hunian Rusunawa yg di Kelola	72 Hunian	318,144,672		142,718,994													72 Hunian	142,718,994	72 Hunian	44.86		
	Kegiatan Penyusunan RP3KP	Jumlah Dokumen RP3KP	1 Dokumen	377,650,000		341,981,000													1 Dokumen	341,981,000	1 Dokumen	90.56		
3	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%	934,277,025	100%	499,228,427	100%	29,999,850	25%	1,359,750	6,439,000							7,798,750	100%	507,027,177	100%	54.27	Bidang P2lh
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	3 dokumen	314,326,475	1 dokumen	284,326,625	1 dokumen	29,999,850		1,359,750	6,439,000							7,798,750	1 dokumen	292,125,375	1 dokumen	92.94	
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	3 dokumen	314,326,475	1 dokumen	284,326,625	1 dokumen	29,999,850		1,359,750	6,439,000								7,798,750	1 dokumen	292,125,375	1 dokumen	92.94
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	3 dokumen	619,950,550	2 dokumen	214,901,802														2 dokumen	214,901,802	2 dokumen	34.66	
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW	2 dokumen	76,970,350	1 dokumen	40,196,600														1 dokumen	40,196,600	1 dokumen	52.22	
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Perubahan RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	3 dokumen	542,980,200	1 dokumen	174,705,202														1 dokumen	174,705,202	1 dokumen	32.18	

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)	Jumlah Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	2 Jenis	1,073,265,000		681,870,450		-										2 Jenis	681,870,450	2 Jenis	63.53	Bidang P2LH
	Kegiatan Koordinasi Penilaian Adi Pura	Jenis Penilaian Adi Pura	2 Jenis	218,075,000		190,354,550		-										2 Jenis	190,354,550	2 Jenis	87.29	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pertemuan kader	12 kali	133,025,000		104,329,300		-										12 kali	104,329,300	12 kali	78.43	
	Kegiatan Pengembangan Adiwiyata	Jumlah sekolah Adiwiyata	45 Sekolah	584,665,000		467,538,650		-										45 Sekolah	467,538,650	45 Sekolah	79.97	
	Kegiatan Keaneakara gaman Ekosisten dan Hayati (KEHATI)	Jumlah Profil KEHATI Kota Padang Panjang	1 Doku men	54,550,000		49,232,350		-										1 Doku men	49,232,350	1 Doku men	90.25	
	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jenis Data dan Informasi Lingkungan	5 Jenis	48,500,000		41,708,750		-										5 Jenis	41,708,750	5 Jenis	86.00	
	Kegiatan Penyusunan DIKPLHD	Jumlah Dokumen DIKPLHD	1 Doku men	34,450,000		19,061,400		-										1 Doku men	19,061,400	1 Doku men	55.33	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	32-29	1,748,756,473	28.57	528,605,863	28.57	421,825,716	13,354,912	88,401,752	-	-	-	-	101,756,664	28.57	630,362,527	28.57	36.05	Bidang PSPP		
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil Uji, Jumlah kampung iklim yg di Bina	2 jenis, 9 kam pung iklim	1,544,184,326	2 jenis, 6 kam pung iklim	501,713,388	2 jenis, 6 kampung iklim	366,542,724	2 jenis, 6 kampung iklim	13,354,912	2 jenis, 6 kampung iklim	88,401,752	-	-	101,756,664	2 jenis, 6 kam pung iklim	603,470,052	2 jenis, 6 kam pung iklim	39.08			
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kampung iklim yang dibina	9 kam pung iklim	208,958,018	6 kam pung iklim	162,063,480	6 kam pung iklim	56,910,324	6 kam pung iklim	352,800	6 kam pung iklim	832,000			1,184,800	6 kam pung iklim	163,248,280	6 kam pung iklim	78.12			
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jenis hasil uji	2 jenis	715,889,908	2 jenis	339,649,908										2 jenis	339,649,908	2 jenis	47.44	UPTD Labor		
	Sub Kegiatan Pengelo laan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil uji	2 jenis	619,336,400	2 jenis		2 jenis	309,632,400	2 jenis	13,002,112	2 jenis	87,569,752			100,571,864	2 jenis	100,571,864	2 jenis	16.24	UPTD Labor		
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data kualitas lingkungan, Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	2 data, 1 sungai	204,572,147	2 data, 1 sungai	26,892,475	2 Data sungai,	55,282,992								2 data, 1 sungai	26,892,475	2 data, 1 sungai	13.15			
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Data kualitas lingkungan	2 data	204,572,147	2 data	26,892,475	1 data	55,282,992								2 data	26,892,475	2 data	13.15			

		Jumlah Sungai yg diventarisasi dan diawasi Sumber Pencemarnya	1 Sungai		1 Sungai		1 Sungai		1 Sungai		1 Sungai				1 Sungai		1 Sungai		1 Sungai	0.00				
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Pemenuhan Mutu Air pada Tingkat Cemar Sedang	35-34	672,943,237		281,895,015		-		-				-		-	31	281,895,015	31	41.89	Bidang PSPP		
		DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan)	Jumlah Unit dan Jumlah Jenis Bantuan DAK	2 Unit	372,824,000		160,000,000		-		-				-		-	2 Unit	160,000,000	2 Unit	42.92			
		Pengujian Kualitas Lingkungan	Jenis Hasil Uji	2 Jenis	186,067,737		110,078,985		-		-				-		-	2 Jenis	110,078,985	2 Jenis	59.16			
		Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbunanya Kampung Iklim	5 Kampung iklim	114,051,500		11,816,030		-		-				-		-	5 Kampung iklim	11,816,030	5 Kampung iklim	10.36			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Ketersediaan Dokumen KEHATI	100%	5,457,270,100		-	100%	2,737,035,100	25%	244,960,984		458,633,548		-		-	703,594,532	100%	703,594,532	100%	12.89	Bidang PSPP	
			Presentase Ketersediaan RTH Publik					2.9%		2.9%							-	2.9%		2.9%	0.00			
		Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Mutu Air pada Tingkat Cemar Ringan	2 Keca matan, 2 Data	5,457,270,100		-	2 Keca matan, 2 Data	2,737,035,100	2 Keca matan	244,960,984		458,633,548		-		-	703,594,532	2 Keca matan	703,594,532	2 Keca matan	12.89		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kehati, dan Jumlah Dokumen Data Monitoring KAHATI	1 Dokumen Monitoring, 1 Dokumen Rencana Pemanfaatan KEHATI	199,857,000		-	1 Dokumen Monitoring, 1 Dokumen Rencana Pemanfaatan KEHATI	79,622,000		-		1,050,000					1,050,000		1,050,000		0.53		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman yg dibangun dan jumlah taman yg terpelihara	8 lokasi dan 2 kecamatan	5,257,413,100		-	4 lokasi dan 2 kecamatan	2,657,413,100	2 keca matan	244,960,984		2 keca matan	457,583,548				2 keca matan	702,544,532	2 keca matan	702,544,532	2 keca matan	13.36	
Meningkatkannya Pelayanan Pengendalian Stunting dari Urusan Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes (Jmlh Fasyankes yg mengelola Limbah/Penghasil Limbah	20-25	140,816,000		20-25	75,139,625	26-30	58,150,000		-					-	20-25	75,139,625	20-25	53.36	Bidang PSPP		
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes yg mengelola Limbah/Penghasil Limbah	10 Fasyankes	140,816,000		20 Fasyankes	75,139,625	10 lokasi	58,150,000		-						20 Fasyankes	75,139,625	20 Fasyankes	53.36			
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha/kegiatan penghasil LB3 yang dibina	20 Fasyankes	140,816,000		10 Fasyankes	75,139,625	10 Fasyankes	58,150,000		-						10 Fasyankes	75,139,625	10 Fasyankes	53.36			

Meningkatkannya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan lahan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan penerapan Izin Lingkungan	65%	99,731,450	50%	20,897,600	60%	35,851,800	60%	1,165,500	4,800,600	-	-	-	-	5,966,100	50%	26,863,700	50%	26.94	Bidang P2Ih
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	110 Kegiatan	99,731,450	100 Kegiatan	20,897,600	105 Kegiatan	35,851,800	8 Kegiatan	1,165,500	17 Kegiatan	4,800,600	-	-	-	5,966,100	108 Kegiatan	26,863,700	108 Kegiatan	26.94	
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	105 Kegiatan	99,731,450	100 Kegiatan	20,897,600	105 Kegiatan	35,851,800	8 Kegiatan	1,165,500	17 Kegiatan	4,800,600	-	35 Kegiatan	5,966,100	35 Kegiatan	26,863,700	35 Kegiatan	26.94		
	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tingkat Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	31%	185,044,800	31%	178,780,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31%	178,780,400	31%	96.61	Bidang PSP	
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha/kegiatan yg diawasi	90 Usaha/kegiatan	27,162,000	-	20,897,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 Usaha/kegiatan	20,897,600	90 Usaha/kegiatan	76.94		
	Penyusunan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	157,882,800	-	157,882,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	157,882,800	1 Dokumen	100.00		
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100%	613,160,800	100%	218,741,850	100%	194,398,200	25%	-	54,846,500	-	-	-	54,846,500	100%	273,588,350	100%	44.62	Bidang P2Ih	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan kader lingkungan, Jenis Data dan Informasi Lingkungan yang disajikan	12 kali pertemuan, 4 jenis	613,160,800	8 kali pertemuan	218,741,850	4 kali pertemuan, 2 Jenis	194,398,200	1 kali pertemuan	-	1 Jenis Data Informasi dan 1 kali pertemuan	54,846,500	-	-	1 Jenis Data Informasi dan 1 kali pertemuan	54,846,500	1 Jenis Data Informasi dan 10 kali pertemuan	273,588,350	9 kali pertemuan	44.62	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pertemuan kader lingkungan	16 kali pertemuan	453,160,800	8 kali pertemuan	218,741,850	4 kali pertemuan	114,399,700	1 kali pertemuan	-	1 kali pertemuan	50,846,500	-	-	2 kali pertemuan	50,846,500	10 kali pertemuan	269,588,350	10 kali pertemuan	59.49	
	Penyelenggaraan Kampanye Lingkungan	Jenis Data dan Informasi Lingkungan yg disajikan	2 Jenis	160,000,000	-	-	2 jenis Data dan Informasi Lingkungan	79,998,500	-	-	1 jenis Data dan Informasi Lingkungan	4,000,000	-	-	1 jenis Data dan Informasi Lingkungan	4,000,000	1 jenis Data dan Informasi Lingkungan	4,000,000	1 jenis Data dan Informasi Lingkungan	2.50	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 jenis	243,205,750	-	52,978,350	2 jenis	74,387,300	-	-	-	26,170,000	-	-	26,170,000	2 jenis	79,148,350	2 jenis	32.54	Bidang P2Ih	

	Kegiatan Pengelolaan Sampah	-Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada -Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan -Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat -Jenis sarana prasarana persampahan Jumlah TPA yang dipelihara Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah	185 orang, 25 kali ,penekagan perda 3 kali penganaan lahan TPA 1 Unit, 1 dokumen 4 lapo ran	33,524,792,899	183 orang, 2 jns	13,817,454,072	2 laporan, 183 orang, 3 kali , 1 TPA	7,880,428,350	183 orang, 1 TPA	1,275,168,107	178 orang, 1 TPA	2,250,725,668	-	-	3,525,893,775	178 orang, 1 TPA	17,343,347,847	183 orang, 2 jns	51.73		
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Jastrada	4 laporan	31,280,000			2 laporan	15,639,950				815,850			815,850		815,850		2.61		
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melaku kan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan,	183 org	26,074,916,899	183 orang	12,490,034,809	183 orang	6,165,613,200	183 orang	1,099,095,858	178 orang	1,668,753,587		178 orang	2,767,849,445	183 orang	15,257,884,254	183 orang	58.52		
		Jumlah petugas kebersihan yang dilatih	183 org												-		-		0.00		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jenis Sarana prasarana persampahan (APBD)	3 jenis, 1 TPA	5,544,595,800	2 jenis	1,157,044,923									-	2 jenis	1,157,044,923	2 jenis	20.87		
	Sub Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Sampah bagi Masyarakat	7 kali	194,825,000	3 kali	170,374,340	3 kali	20,000,000		-		-			-	3 kali	170,374,340	3 kali	87.45		
	Sub Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPATPST/SPA	Jumlah TPA yg terpelihara	1 TPA	1,679,175,200			1 TPA	1,679,175,200	1 TPA	176,072,249	1 TPA	581,156,231		1 TPA	757,228,480	1 TPA	757,228,480	1 TPA	45.10		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	30,650,461,859	100%	8,276,008,906	100%	5,265,515,884	25%	992,515,153		1,505,001,511		-	-	2,497,516,664	100%	10,773,525,570	100%	35.15	Bagian Sekre tariat
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja, laporan keuangan perangkat daerah	20 laporan	500,000	20 laporan	465,500									-	20 laporan	465,500	20 laporan	93.10		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja, laporan keuangan perangkat daerah	20 laporan	500,000	20 laporan	465,500									-	20 laporan	465,500	20 laporan	93.10		

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran, Jumlah Laporan Prognosis	37 orang, 45 laporan	17,439,872,293	37 orang, 15 laporan	4,229,868,223	37 orang, 15 laporan	4,096,841,064	37 orang, 4 laporan	816,280,293	36 orang, 4 laporan	1,218,806,087				2,035,086,380	37 orang, 15 laporan	6,264,954,603	37 orang, 15 laporan	35.92
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg dibayarkan Gaji dan tunjangan	37 orang	17,433,272,293	37 orang	4,228,535,723	37 orang	4,095,191,064	37 orang	816,280,293	36 orang	1,218,057,087			36 orang	2,034,337,380	37 orang	6,262,873,103	37 orang	35.92
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 laporan	3,400,000	1 laporan	672,500	1 laporan	850,000	1 laporan	-	1 laporan	749,000			1 laporan	749,000	2 laporan	1,421,500	2 laporan	41.81
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	39 laporan	2,000,000	13 laporan	387,000	13 laporan	500,000	3 laporan	-	3 laporan	-			6 laporan	-	19 laporan	387,000	19 laporan	19.35
	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	3 laporan	1,200,000	1 laporan	273,000	1 laporan	300,000	-	-	-	-			-	1 laporan	273,000	1 laporan	22.75	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan, jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan, Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah pengadaan yang disediakan, Jumlah makan dan minum yang disediakan, Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	63 jenis, 174 jenis, 2 gedung kantor, 36 jenis dan 29928 lembar, 3099 ok, 414 ok	1,622,883,632	21 jenis, 58 jenis, 2 gedung kantor, 12 jenis dan 9976 lembar, 1033 ok, 150 ok	1,052,291,691	21 jenis, 58 jenis, 2 gedung kantor, 12 jenis dan 9976 lembar, 1033 ok, 150 ok	209,701,950	2 jenis, 7 jenis, 2 gedung kantor, 7 jenis dan 9976 lembar, 165 ok, 36 ok	30,773,800	3 jenis, 21 jenis, 2 gedung kantor, 37 jenis dan 1231 lembar, 187 ok, 83 ok	66,827,535				97,601,335	21 jenis, 58 jenis, 2 gedung kantor, 12 jenis dan 9976 lembar, 1033 ok, 150 ok	1,149,893,026	21 jenis, 58 jenis, 2 gedung kantor, 12 jenis dan 9976 lembar, 1033 ok, 150 ok	70.85
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan	21 jenis	75,367,270	21 jenis	49,851,640	21 jenis	8,320,000	2 jenis	673,000	3 jenis	455,000			5 jenis	1,128,000	5 jenis	50,979,640	21 jenis	67.64
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	58 jenis	547,293,574	58 jenis	247,729,578	58 jenis	66,429,000	7 jenis	5,979,900	21 jenis	11,184,300			28 jenis	17,164,200	58 jenis	264,893,778	58 jenis	48.40
		Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 gedung kantor		2 gedung kantor		2 gedung kantor		2 gedung kantor		2 gedung kantor				2 gedung kantor	-	2 gedung kantor	-	2 gedung kantor	0.00
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah pengadaan yang disediakan	12 jenis dan 29928 pgdaan	68,836,500	12 jenis dan 6331 pgdaan	65,635,325	12 jenis dan 9976 pgdaan	14,737,950	7 jenis dan 1065 pgdaan		3 jenis dan 1231 pgdaan	1,877,350			10 jenis dan 2296 pgdaan	1,877,350	12 jenis dan 8627 pgdaan	67,512,675	12 jenis dan 8627 pgdaan	98.08
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum yang disediakan	3099 ok	931,386,288	1033 ok	689,075,148	1033 ok	120,215,000	165 ok	24,120,900	187 ok	53,310,885			352 ok	77,431,785	1385 ok	766,506,933	1033 ok	82.30
		Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	414 ok		150 ok		150 ok		36 ok		83 ok				119ok	-	269 ok	-	269 ok	0.00
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atributnya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	70 pegawai	128,100,000											-					0.00
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atributnya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	70 pegawai	128,100,000											-					0.00

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan, Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 unit, 5 jenis	1,002,500,670	6 jenis	97,465,000	6 unit, 3 unit	70,369,070	6 unit, 3 unit	19,850,000	-	-	-	-	-	-	19,850,000	6 jenis	117,315,000	6 jenis	11.70
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yg diadakan	8 unit	400,000,000													-				0.00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	9 unit	424,250,670	6 jenis	97,465,000	6 unit	36,369,070		-	-						-	6 jenis	97,465,000	6 jenis	22.97
	Sub Kegiatan Pengadaan Pengadaan sarana dan perasarana pendukung gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 sarana	178,250,000			3 unit	34,000,000	3 unit	19,850,000	-				3 unit		19,850,000	3 unit	19,850,000	3 unit	11.14
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tagihan jasa air, listrik, telepon yang dibayarkan, Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia	104 rekening, 16 orang	2,755,970,935	60 rekening, 16 orang	1,454,101,155	36 rekening, 29 orang	602,998,400	36 rekening, 29 orang	91,952,310	36 rekening, 29 orang	159,381,779					251,334,089	60 rekening, 16 orang	1,705,435,244	60 rekening, 16 orang	61.88
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa air yang dibayarkan	72 rekening	239,220,143	24 rekening	123,115,577	24 rekening	51,932,000	6 rekening	11,918,230	6 rekening	12,107,699			6 rekening		24,025,929	30 rekening	147,141,506	30 rekening	61.51
		Jumlah tagihan jasa listrik yang dibayarkan	72 rekening		24 rekening		24 rekening		6 rekening		6 rekening				6 rekening		-	30 rekening		30 rekening	0.00
		Jumlah tagihan jasa telepon yang dibayarkan	12 rekening		12 rekening		12 rekening		3 rekening	3 rekening					3 rekening		-	18 rekening		18 rekening	0.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia	23 orang	2,516,750,792	23 orang	1,330,985,578	29 orang	551,066,400	29 orang	80,034,080	29 orang	147,274,080					227,308,160	29 orang	1,558,293,738	29 orang	61.92
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara, Jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara, Jumlah gedung kantor yang terpelihara	34 unit, 6 jenis, 2 gedung kantor	7,700,634,329	28 unit, 2 jenis, 1 gedung kantor	1,441,817,337	3 unit, 6 jenis, 2 gedung kantor	285,605,400	1 unit, 3 jenis, 26 gedung kantor	33,658,750		59,986,110					93,644,860	28 unit, 2 jenis, 1 gedung kantor	1,535,462,197	28 unit, 2 jenis, 1 gedung kantor	19.94
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara	4 unit	2,792,974,730	28 unit	849,775,550	1 unit	32,724,000	1 unit	6,688,500	1 unit	4,360,500			1 unit		11,049,000	1 unit	860,824,550	1 unit	30.82
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan lapangan yang terpelihara	28 unit	1,086,321,392	28 unit												-	28 unit		28 unit	0.00

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan lapangan yang terpelihara	28 unit	2,899,034,850	28 unit	241,949,030	6 unit	118,162,000	6 unit	26,890,250	6 unit	17,513,950				6 unit	44,404,200	6 unit	286,353,230	6 unit	9.88	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara	6 jenis	142,728,100	2 jenis	41,208,100	6 jenis	36,720,000	2 jenis	80,000	2 jenis	650,000					730,000	2 jenis	41,938,100	2 jenis	29.38	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 gedung kantor	779,575,257	1 gedung kantor	308,884,657	2 gedung kantor	97,999,400			1 gedung kantor	37,461,660				1 gedung kantor	37,461,660	1 gedung kantor	346,346,317	1 gedung kantor	44.43	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Jumlah ASN yg mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-undangan		750,000		-		-		-		-		-		-	-		-		0.00	Bagian Sekreteriat
	Bimtek Implementasi Perundang-undangan	Jumlah ASN yg mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-undangan	1 Tahun	750,000		-		-		-		-		-		-	-		-		0.00	
																	-		-		0.00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang membawahi dua urusan wajib yaitu urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan minimal di Bidang Perumahan Rakyat adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran untuk 2 unit rehab rumah bagi korban bencana, sementara untuk rehab rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah, baru dianggarkan Tahun 2023 sebanyak 2 unit.

Sementara itu untuk kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup, tidak ada ketentuan pelaksanaan SPM tertentu semenjak Tahun 2014. Namun layanan informasi kualitas lingkungan sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM sebelumnya tetap disediakan melalui berbagai kegiatan terkait.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

No	INDIKATOR	SPM / standar nasional	IKK	TARGET RENSTRA OPD		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2020	2021	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100% (2024)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100% (2024)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pengurangan kawasan kumuh		10% (2019)	14,56%	13,83%	16,45%	23,28%	35,28%	39%
4	Rasio rumah layak huni					94,63	94,96	95,24	95,56
5	Persentase permukiman layak huni		90%	97%	94,12%	95,97%	94,12%	97,01%	97,90%

6	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard			84	86	84,16%	86%	88%	91%
7	Indek Kualitas Lingkungan (IKLH)		69,74 (2024)	65,79- 67,14	72,42	70,47	61,16	72,65	72,87
a.	Indeks Kualitas Air (IKA)		46	41,40- 42,30	55,79	47,89	31,86	55,89	55,99
b.	Indeks Kualitas Udara (IKU)			90 - 93,5	89	91,88	91,07	89,11	89,22
c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			65,26	70,29	69,62	56,18	70,97	71,64
8	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		75%	75%	72%	85,93%	89,65%	73%	72%
9	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan dan/atau SPPL			31	50	31,4	52,4	60	65

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Beberapa isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas OPD pada urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan luas wilayah secara administratif yang hanya 23 km², diikuti dengan topografi yang didominasi kemiringan lebih dari 40%, menjadi batasan utama dalam pemanfaatan lahan di Kota Padang Panjang, khususnya untuk kegiatan budidaya. Sementara kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

2. Potensi berkembangnya kawasan kumuh perkotaan akibat ketidakteraturan bangunan perumahan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang, ditetapkan kawasan kumuh baru di Kota Padang Panjang seluas 47,718 Ha. Sebelumnya dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 050/357/WAKO-PP/2014 Tahun 2014 dimana luas kawasan kumuh adalah sebesar 53,06 Ha, dan telah berhasil dituntaskan sampai Tahun 2020. Dengan munculnya kawasan kumuh baru ini, maka upaya-upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilaksanakan, sekaligus mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh baru akibat perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

3. Belum Optimalnya Penanganan rumah tidak layak huni.

Berdasarkan perhitungan Tahun 2021, ratio rumah layak huni di Kota Padang Panjang mencapai 94,96%. Hal ini berarti masih ada potensi Rumah Tidak Layak Huni sebesar 5,04%. Sampai Tahun 2021 terdapat 356 unit rumah tidak layak huni. Apabila tidak ada penanganan lebih lanjut, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni berpotensi memunculkan Kawasan Kumuh baru yang dapat berakibat pada penurunan kualitas hidup dan kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

4. Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman

Dengan adanya pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap perumahan terus meningkat. Penambahan perumahan dan permukiman ini, harus diiringi dengan penyediaan sarana prasarana umum (PSU) yang memadai. Salah satu sarana prasarana umum yang perlu mendapat perhatian yaitu saluran drainase. Curah hujan yang relatif tinggi di Kota Padang Panjang, kecenderungan pola pembangunan yang semakin mengurangi areal resapan air, berpotensi meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Maka diperlukan upaya pemeliharaan saluran drainase terutama di kawasan permukiman.

2.3.2 Urusan Lingkungan Hidup

Sementara itu untuk urusan lingkungan hidup, beberapa isu strategis yang menyangkut dengan penyelenggaraan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan pencemaran air permukaan.

Pada Tahun 2021, Indek Kualitas Air di Kota Padang Panjang berada pada angka 31, 86. Hal ini mengindikasikan tingkat pencemaran air yang masih buruk. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 kualitas air kota padang panjang mengalami penurunan. Tahun 2020 7 sungai yang ada di padang panjang telah berada di status cemar ringan, Namun Tahun 2021 berdasarkan hasil pengujian, ke 7 sungai tersebut menurun statusnya kembali menjadi cemar sedang. Hal ini tentunya menuntut perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Daerah. Langkah-langkah komprehensif yang terpadu perlu dilakukan dengan seluruh sektor terkait, termasuk mengembangkan kerjasama pengelolaan sungai dengan kabupaten tetangga. Tingkat pencemaran air akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup daerah secara keseluruhan. Dari data indeks kualitas air juga dapat terlihat tingkat ketaatan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Data hasil pengawasan Tahun 2021 menunjukkan tingkat ketaatan yang masih rendah di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 52,4%.

2. Belum Optimalnya penanganan sampah perkotaan

Sesuai dengan arahan Jakstrada Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, penanganan sampah di Kota Padang Panjang ditargetkan menurun dari tahun ke tahun. Penurunan penanganan ini berkorelasi dengan target pengurangan timbulan sampah dari sumber yang meningkat dari waktu ke waktu. Namun realisasi pada tahun 2021 menunjukkan justru terjadi peningkatan penanganan sampah mencapai 89,65% dari target seharusnya sebesar 74%. Realisasi ini menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA relatif masih tinggi dan pengurangan timbulan dari sumber belum terlaksana secara optimal.

Dengan hampir berakhirnya umur pakai TPA Sungai Andok akan berpengaruh terhadap kinerja penanganan sampah Kota Padang Panjang. Apabila tidak didapatkan lokasi baru untuk dijadikan TPA di Kota Padang Panjang, maka pembuangan sampah kota bisa dilakukan ke TPA Regional yang berada di daerah lain. Tentunya untuk dapat melaksanakan opsi tersebut, diperlukan sumber daya yang cukup besar baik dalam hal personil, ketersediaan armada pengumpulan dan pengangkutan serta kemampuan pembiayaan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2022

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 terdiri dari 11 Program, 17 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dengan Pagu Indikatif Rp. 23.554.687.281,- dan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dengan Pagu Indikatif Rp. 24.552.526.986,-. Terdapat penambahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 997.839.705,-

Penambahan ini untuk mengakomodir usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik yang diperoleh dari hasil musrenbang maupun pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penyesuaian biaya perjalanan dinas, Penyesuaian harga bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas dan operasional, serta penyesuaian harga belanja operasi pelaksanaan kegiatan lainnya.

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan tahun 2022
Kota Padang Panjang

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		Catatan Penting
					Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				23,530,765,380	23,554,687,281	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				23,530,765,380	24,552,526,986	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,017,278,484	5,372,627,921	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,017,278,484	5,506,521,718	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan kinerja, laporan keuangan perangkat daerah	20 laporan		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan kinerja, laporan keuangan perangkat daerah	20 laporan		-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,096,841,064	4,357,188,901	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,096,841,064	4,485,359,822	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	4,095,191,064	4,355,538,901	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	4,095,191,064	4,483,709,822	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	850,000	850,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	850,000	850,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	13 laporan	500,000	500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	13 laporan	500,000	500,000	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Padang Panjang	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 laporan	300,000	300,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Padang Panjang	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 laporan	300,000	300,000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah				192,832,950	272,832,950	Administrasi Umum Perangkat Daerah				192,832,950	253,045,826	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	21 jenis	5,920,750	5,920,750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	21 jenis	5,920,750	5,920,750	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	58 jenis	52,508,250	59,344,350	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	58 jenis	52,508,250	59,344,350	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah jenis barang cetakan dan Jumlah Penggandaan yang disediakan	13 jenis	14,188,950	14,188,950	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah jenis barang cetakan dan Jumlah Penggandaan yang disediakan	13 jenis	14,188,950	14,188,950	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	1033 Ok 138 kali	120,215,000	193,378,900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti	1033 Ok 138 kali	120,215,000	173,591,776	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70,369,070	70,369,070	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70,369,070	70,369,070	
9	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	4 unit	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	4 unit	-	-	
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	9 unit	36,369,070	36,369,070	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	9 unit	36,369,070	36,369,070	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	3 unit	34,000,000	34,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	3 unit	34,000,000	34,000,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				458,361,400	473,363,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				458,361,400	502,463,000	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (PERKIM)	Padang Panjang	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	60 rekening	18,157,000	33,159,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	36 rekening	18,157,000	33,159,000	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PERKIM)	Padang Panjang	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	16 Orang	440,204,400	440,020,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	16 Orang	440,204,400	469,304,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				198,874,000	198,874,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				198,874,000	195,284,000	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit	32,724,000	32,724,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	1 Unit	32,724,000	32,724,000	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah kegiatan operasional yang dipelihara	38 unit	90,650,000	90,650,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	9 unit	90,650,000	87,060,000	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah peralatan dan Mesin yang dipelihara	6 unit	28,880,000	28,880,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 jenis	28,880,000	28,880,000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (PERKIM)	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	2 unit	46,620,000	46,620,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	46,620,000	46,620,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				310,295,580	321,895,580	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				310,295,580	335,142,984	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				50,509,000	50,509,000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				50,509,000	50,509,000	
18	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Padang Panjang	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	10 unit	50,509,000	50,509,000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Padang Panjang	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	2 unit	50,509,000	50,509,000	

	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				259,786,580	271,386,580	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				259,786,580	284,633,984		
20	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Padang Panjang	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola. Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	72 hunian 6 orang	259,786,580	271,386,580	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Padang Panjang	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian 6 orang	259,786,580	284,633,984		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1,063,498,800	1,073,855,280	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1,063,498,800	1,045,063,480		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				49,999,900	61,149,900	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					49,999,900	57,304,100	
21	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Padang Panjang	-	-	49,999,900	61,149,900	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			1 Dokumen	49,999,900	57,304,100		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				1,013,498,900	1,012,705,380	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					1,013,498,900	987,759,380	
22	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Padang Panjang	Jumlah rumah yang direhab	85 unit	900,000,000	900,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Padang Panjang	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	43 unit	900,000,000	900,000,000		
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Padang Panjang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	10 kali	113,498,900	112,705,380	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	10 kali	113,498,900	87,759,380		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				6,017,249,000	5,914,499,000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				6,017,249,000	6,419,839,000		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				6,017,249,000	5,914,499,000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				6,017,249,000	6,419,839,000		
24	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengamanan Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan) Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)	2 Kecamatan 15 Lokasi 10 Lokasi 7 Lokasi	6,017,249,000	5,914,499,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengamanan Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan) Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)	2 Kecamatan 10 Lokasi 73 Lokasi 16 Lokasi 12 Lokasi	6,017,249,000	6,419,839,000		

	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				29,999,850	27,062,000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				29,999,850	24,562,000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				29,999,850	27,062,000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				29,999,850	24,562,000	
21	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah dokumen DDDT yang direvisi jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	29,999,850	27,062,000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	1 Dokumen 1 Dokumen	29,999,850	24,562,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				112,193,316	90,217,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				112,193,316	81,524,000	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				56,910,324	47,702,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				56,910,324	36,502,000	
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Padang Panjang	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	6 kampung	56,910,324	47,702,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Padang Panjang	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	6 kampung	56,910,324	36,502,000	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				55,282,992	42,515,000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				55,282,992	45,022,000	
26	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Padang Panjang	Data kualitas lingkungan Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	2 Data 1 Sungai	55,282,992	42,515,000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Padang Panjang	Data kualitas lingkungan Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	2 Data 1 Sungai	55,282,992	45,022,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2,737,035,100	2,621,176,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2,737,035,100	2,603,508,100	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				2,737,035,100	2,621,176,600	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				2,737,035,100	2,603,508,100	

27	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Padang Panjang	Jumlah dokumen data monitoring keaneekaragaman hayati Jumlah dokumen rencana pemanfaatan keaneekaragaman hayati	1 Dokumen 1 Dokumen	79,622,000	81,958,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1 Dokumen	79,622,000	77,343,000	
28	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Padang Panjang	Jumlah dokumen data keaneekaragaman hayati Jumlah dokumen rencana pemanfaatan keaneekaragaman hayati	1 Dokumen 1 Dokumen	2,657,413,100	2,539,218,600	Pengelolaan Ruang TerbukaHijau (RTH)	Padang Panjang	Jumlah lokasi pembuatan taman Jumlah lokasi pemeliharaan taman	3 lokasi 2 kecamatan	2,657,413,100	2,526,165,100	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				58,150,000	24,701,000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				58,150,000	22,701,000	
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				58,150,000	24,701,000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				58,150,000	22,701,000	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan,dan/atau Penimbunan	Padang Panjang	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	10 fanyakes	58,150,000	24,701,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan,dan/atau Penimbunan	Padang Panjang	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	10 fanyakes	58,150,000	22,701,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				35,851,800	21,676,050	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				35,851,800	14,044,050	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				35,851,800	21,676,050	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				35,851,800	14,044,050	

30	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Perda yang dibuat. Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	1 perda	35,851,800	21,676,050	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, Surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	25 Laporan	35,851,800	14,044,050
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				194,398,200	134,798,200	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				194,398,200	149,298,200
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				194,398,200	134,798,200	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				194,398,200	149,298,200
31	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Padang Panjang	Jumlah pertemuan kader lingkungan	4 kali	114,399,700	114,399,700	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Padang Panjang	Jumlah pertemuan kader lingkungan	4 kali	114,399,700	114,399,700
32	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan	2 jenis	79,998,500	20,398,500	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan	1 lomba	79,998,500	34,898,500
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				74,387,300	74,387,300	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				74,387,300	66,512,300
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				74,387,300	74,387,300	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				74,387,300	66,512,300
33	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	3 Kali 40 Sekolah	74,387,300	74,387,300	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	3 Kali 40 Sekolah	74,387,300	66,512,300

	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				7,880,428,350	7,877,791,350	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				7,880,428,350	8,283,810,154
	Penanganan Sampah				7,880,428,350	7,877,791,350	Penanganan Sampah				7,880,428,350	8,283,810,154
34	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada	2 laporan	15,639,950	15,639,950	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada	2 laporan	15,639,950	15,639,950
35	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	181 Orang	6,165,613,200	6,162,976,200	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	181 Orang	6,165,613,200	6,257,976,200
36	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	3 kali	20,000,000	20,000,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	3 kali	20,000,000	20,000,000
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jenis prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	3 jenis	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jenis prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	3 jenis	-	-
37	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang P	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	1,679,175,200	1,679,175,200	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	1,679,175,200	1,990,194,004

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		KebutuhanDana (Rp.000)	Catatan Penting	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP					557,870,200	533,948,299	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				557,870,200	501,853,600	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					248,237,800	227,315,900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				248,237,800	229,263,700	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					16,869,000	15,326,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah				16,869,000	17,274,300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD)	Padang Panjang				2,399,250	2,399,250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD)	Padang Panjang			2,399,250	2,399,250	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD)	Padang Panjang				13,920,750	11,978,250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD)	Padang Panjang			13,920,750	13,920,750	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD)	Padang Panjang				549,000	949,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD)	Padang Panjang			549,000	954,300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					144,637,400	144,637,400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				144,637,400	144,637,400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD)	Padang Panjang				33,775,000	33,775,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD)	Padang Panjang			33,775,000	33,775,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD)	Padang Panjang				110,862,400	110,862,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD)	Padang Panjang			110,862,400	110,862,400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86,731,400	67,352,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86,731,400	67,352,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD)	Padang Panjang				27,512,000	27,512,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD)	Padang Panjang			27,512,000	27,512,000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	Padang Panjang			7,840,000	4,840,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	Padang Panjang			7,840,000	4,840,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD)	Padang Panjang			51,379,400	35,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD)	Padang Panjang			51,379,400	35,000,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				309,632,400	306,632,399	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				309,632,400	274,532,400	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				309,632,400	306,632,399	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				309,632,400	274,532,400	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPTD)	Padang Panjang			309,632,400	306,632,399	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPTD)	Padang Panjang			309,632,400	274,532,400	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi maupun perguruan tinggi. Usulan tersebut berupa usulan Musrenbang dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 terdapat beberapa tambahan usulan pikir yang diakomodir melalui Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian. Usulan tersebut diantaranya :

1. Pengecoran Jalan Setapak RT. 20 Kel. Silaing Bawah
2. Peningkatan Jalan Setapak Azzura Mart
3. Rehab Jalan Setapak RT 15 dan RT 17 Kelurahan Balai-Balai
4. Pengecoran Jalan Belakang MIUT Kel. Guguk Malintang
5. Pembuatan dan Perbaikan Drainase RT 12 Kel. Ganting
6. Pendaman Tebing RT 12 Kelurahan Tanah Hitam
7. Pendaman Tanah Jalan ke Mushalla Istiqomah RT 24 Kel. Kampung Manggis

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Renja Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Beberapa indikator pada prioritas dan sasaran pembangunan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal di Daerah yaitu (1) Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni; dan (2) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Target capaian dari masing-masing indikator tersebut pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Untuk dapat mewujudkan target tersebut Pemerintah Daerah perlu menyiapkan beberapa alternatif kebijakan diantaranya penyediaan hunian baru pelaksanaan rehabilitasi hunian atau penyediaan penampungan sementara yang layak huni.

Dalam hal penanganan kawasan kumuh, di Kota Padang Panjang telah ditetapkan kawasan kumuh seluas 47,718 Ha melalui Keputusan Walikota Nomor 189 Tahun 2020. Oleh karena itu kebijakan penanganan kawasan ini secara terpadu dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk dapat dituntaskan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam hal memenuhi ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat, Pemerintah Kota Padang Panjang juga perlu menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan Nasional yakni meningkatkan jumlah rumah layak huni. Jika secara nasional ditargetkan pengurangan rumah tidak layak huni mencapai 118.960 unit pada Tahun 2022, maka Kota Padang Panjang juga perlu menerapkan kebijakan serupa di level daerah yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Kondisi sampai dengan akhir Tahun 2021 menunjukkan data jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang sebanyak 356 unit. Tahun 2022 ini dialokasikan bantuan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 43 unit.

Sementara itu dengan ditetapkannya target nasional berupa peningkatan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman sebesar 100% pada Tahun 2023, maka daerah perlu mendukungnya dengan menyiapkan kebijakan berupa pembangunan PSU baru maupun peningkatan kualitas PSU yang telah tersedia.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan Kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Menurunnya kawasan kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh	83%	
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio Rumah layak huni	56, 93%	
4	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Nasional Urusan Lingkungan Hidup

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48 poin	Daerah menyesuaikan besaran

2	Meningkatnya penanggungjawab usaha yang taat terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	68%	Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan Kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah, meliputi : a. Persentase pengurangan timbulan sampah c. Persentase penanganan timbulan sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota, meliputi: b. Persentase pengurangan timbulan sampah d. Persentase penanganan timbulan sampah	11,18 31,41	

Untuk urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020. Terdapat prioritas nasional yang terkait dengan KLHK, arah kebijakan dan strategi dalam prioritas tersebut terdiri dari 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3) pembangunan rendah karbon.

Sementara untuk Tahun 2022, prioritas pembangunan nasional pada urusan lingkungan hidup mengarah pada 3 kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih menjadi prioritas yang muncul setiap tahunnya. Kebijakan ini diperlukan sebagai fungsi kontrol terhadap munculnya dampak akibat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Target IKLH nasional yang ditetapkan sebesar 69,22 poin, harus dicapai dengan memastikan perbaikan terhadap kualitas air, udara dan lahan. Untuk Kota Padang Panjang, berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan, maka prioritas utama perlu diarahkan pada perbaikan kualitas air.

Peningkatan kualitas lingkungan tidak bisa terlepas dari peran berbagai *stakeholder*. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kondisi kualitas lingkungan. Ada sejumlah indikator yang perlu dipantau melalui instrumen izin lingkungan, izin PPLH ataupun izin lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu disiapkan berbagai upaya yang dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap ketentuan perizinan lingkungan.

Kinerja berikutnya yang menjadi prioritas pada pembangunan nasional adalah pengelolaan persampahan. Sejalan dengan telah ditetapkannya kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) dibidang persampahan, maka fokus pengelolaan sampah diarahkan pada penurunan timbulan dan penanganan sampah. Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 telah menyikapi kebijakan tersebut melalui penetapan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk Tahun 2023

ditargetkan pengurangan timbulan sampah sebesar 26% dan penanganan sampah sebesar 73%.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

1) Tujuan

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan
2. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tujuan diatas sejalan dengan sasaran pada RPJMD 2018-2023 yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Misi Pertama **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan** dan Misi Kedua **Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya.**

2) Sasaran

Tujuan pertama dijabarkan menjadi dua sasaran yaitu :

- (1) Meningkatnya Kualitas lingkungan permukiman; dan
- (2) Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan.

Tujuan kedua terdiri dari satu sasaran yaitu:

- (1) (3) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

Sementara Tujuan ketiga terdiri dari satu sasaran yaitu :

- (2) Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari Urusan Lingkungan Hidup

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang muncul pada Renja Perubahan Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada dasarnya sama dengan Program dan Kegiatan yang ada pada Renja Tahun 2022.

Terkait visi dan misi Walikota, salah satu sasaran pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dengan indikator persentase kenaikan indeks kualitas layanan infrastruktur (IKLI) dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Menyikapi kebijakan tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk mendukung pencapaian target IKLI. Sementara untuk mendukung capaian target IKLH program yang disiapkan adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengelolaan Persampahan.

Selain mendukung pencapaian target IKLH, pada keempat program tersebut juga diarahkan untuk mendukung capaian target Kebijakan Nasional pada Urusan Lingkungan Hidup yang mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan pembangunan rendah karbon.

Sasaran selanjutnya yang dikembangkan dari visi misi Walikota adalah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sasaran ini ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan prioritas utamanya adalah pembinaan pengelolaan Limbah B3 untuk fasyankes.

Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan. Sasaran ini dirindaklanjuti oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman dengan prioritas utamanya adalah rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini sekaligus juga mendukung tujuan 1 dari SDGs/TPB yaitu tanpa kemiskinan.

Secara keseluruhan, jumlah program yang diajukan dalam Renja Perubahan Tahun 2022 adalah sebanyak 11 program yang terdiri dari 1 program rutin kesekretariatan, 3 program teknis urusan perumahan rakyat dan 8 program yang terkait urusan lingkungan hidup.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Anggaran awal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 23.530.765.380,-. Pengajuan di Renja Perubahan adalah sebesar Rp. 24.552.526.986,- dengan penambahan sebesar Rp. 1.021.761.606,-

Pengajuan penambahan ini untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan sampai akhir Tahun 2022. Diantaranya penyesuaian gaji, penyesuaian perjalanan dinas, mengakomodir kenaikan harga BBM, usulan pokok pikiran anggota Dewan serta penyesuaian belanja operasi.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2022				Catain Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah		Sebelum			Setelah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
104		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										12,408,321,464	13,306,567,182					19,858,824,670		
1041		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,017,278,084	5,506,521,718					9,346,426,970		
10412	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					550,000		
1041201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah laporan kinerja, laporan keuangan perangkat daerah	Tersedianya laporan kinerja									0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	550,000	
1041202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,096,841,064	4,485,359,822					4,703,350,000		
10412021	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Terlaksananya layanan keuangan Daerah									4,095,191,064	4,483,709,822	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	4,700,000,000	
10412025	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Terlaksananya layanan keuangan Daerah									850,000	850,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	2,550,000	
10412027	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan yang disusun	anTegralansan nya /sleamyansatner kaenuangan Daerah									500,000	500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	500,000	
10412028	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah laporan Prognosis yang disusun	Terlaksananya layanan keuangan Daerah									300,000	300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	300,000	
1041206		Administrasi Umum Perangkat Daerah										192,832,950	253,045,826					203,889,510		
10412061	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum OPD									5,920,750	5,920,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	9,162,890	
10412064	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum OPD									52,508,250	59,344,350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	46,239,875	
10412065	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum OPD									14,188,950	14,188,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	16,211,910	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2022		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1041020000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum OPD		90 %	90 %	1033 ok 138 kali	1009 ok 138 kali	100 %	100 %	120,215,000	173,591,776	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	132,274,835
104102007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											70,369,070	70,369,070					620,750,000
104102001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk tahun berjalan		90 %	90 %	4 unit	4 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	442,500,000
104102006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk tahun berjalan		90 %	90 %	9 unit	9 unit	100 %	100 %	36,369,070	36,369,070	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	144,250,000
104102011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk tahun berjalan		90 %	90 %	3 unit	3 unit	100 %	100 %	34,000,000	34,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	34,000,000
104102008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											458,361,000	502,463,000					560,847,760
104102002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah di OPD		90 %	90 %	60 rekening	36 rekening	100 %	100 %	18,157,000	33,159,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	57,125,200
104102004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah di OPD		90 %	90 %	16 orang	16 orang	100 %	100 %	440,204,000	469,304,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	503,722,560
104102009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											198,874,000	195,284,000					19,858,824,670
104102001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah di OPD		90 %	90 %	4 unit	1 unit	100 %	100 %	32,724,000	32,724,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	1,186,704,200
104102002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah kegiatan operasional yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah di OPD		90 %	90 %	38 unit	9 unit	100 %	100 %	90,650,000	87,060,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	1,300,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
104020041906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah di OPD		90 %	90 %	6 unit	4 jenis	100 %	100 %	28,880,000	28,880,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	40,392,000			
104020041909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Terpeliharanya barang milik daerah di OPD		90 %	90 %	2 unit	1 unit	100 %	100 %	46,620,000	46,620,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	729,943,500			
104020042	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										310,295,580	335,142,984					832,255,800			
10402004203	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										50,509,000	50,509,000					566,643,000			
104020042031	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan dibangun	Terbanggunya rumah untuk Korban bencana		97,4 %	97,4 %	10 unit	2 unit	5 Unit	5 Unit	50,509,000	50,509,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %	566,643,000			
10402004205	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus										259,786,580	284,633,984					265,612,800			
104020042051	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	Terkelolanya hunian Rusunawa		97,4 %	97,4 %	72 hunian 6 orang	72 hunian 6 orang	72 Unit	72 Unit	259,786,580	284,633,984	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %	265,612,800			
10403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										1,063,498,800	1,045,063,480					680,141,900			
1040302	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha										49,999,900	57,304,100					0			
104030208	Penyusunan/Revisi/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase pengurangan kawasan kumuh	Jumlah kebijakan yang di buat/di review	Terlaksananya fasilitas kegiatan KOTA KU		40 %	40 %	1 dokumen	1 Tahun	1 Tahun		49,999,900	57,304,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	0			
1040303	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha										1,013,498,900	987,759,380					680,141,900			
104030302	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase pengurangan kawasan kumuh	Jumlah rumah yang direhab	Terlaksananya rehab rumah tidak layak huni		40 %	40 %	85 unit	43 unit	85 Unit	85 Unit	900,000,000	900,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	566,643,000			
104030304	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan	Persentase pengurangan kawasan kumuh	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Terlaksananya rehab rumah tidak layak huni		40 %	40 %	10 kali	10 kali	85 Unit	85 Unit	113,498,900	87,759,380	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	113,498,900			
10405	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										6,017,249,000	6,419,839,000					9,000,000,000			
1040501	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan										6,017,249,000	6,419,839,000					9,000,000,000			
104050102	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran) Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengamanan Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan) Jumlah saluran	Tersedianya PSU di Kawasan Permukiman		88 %	88 %	2 kecamatan 15 lokasi 10 lokasi 7 lokasi	2 kecamatan 15 lokasi 10 lokasi 7 lokasi	4 Jenis	4 Jenis	6,017,249,000	6,419,839,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	88 %	9,000,000,000			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2																				
2	1																			
2	1	0																		
2	1	0	2	01																
2	1	0	2	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	Terevisinya Dokumen Informasi pengelolaan lingkungan												
						100 %	100 %	1 dokumen	0 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	29,999,850	24,562,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	234,000,000		
2	1	0	2	02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							0	0						19,858,824,670	
2	1	0	2	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata	Persentase dokumen perencanaan lingkungan		Tersedianya Dokumen KLHS						0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	150,000,000	
2	1	0																		
2	1	0	3																	
2	1	0	3	01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														856,910,800	
2	1	0	3	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	Jumlah kampung iklim yang dibina	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kota Padang												56,910,800
						35-32 %	35-32 %	6 kampung	6 kampung	1 Tahun	1 Tahun	56,910,324	36,502,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %	56,910,800		
2	1	0	3	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	Jenis hasil uji Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kota Padang												800,000,000
						35-32 %	35-32 %	2 jenis 4 orang	2 jenis 4 orang	1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %	800,000,000		
2	1	0	3	02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														57,881,250	
2	1	0	3	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	Data kualitas lingkungan Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemaran	Diperolehnya data informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat												57,881,250
						35-32 %	35-32 %	2 data 1 sungai	2 data 1 sungai	1 data	1 data	55,282,992	45,022,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %	57,881,250		
2	1	0	4																	
2	1	0	4	01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)														2,550,000,000	
2	1	0	4	01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota														2,550,000,000	
2	1	0	4	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	% ketersediaan RTH publik Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati	Terlaksananya Pengelolaan keaneekaragaman Hayati Kota Padang Panjang												0
						4 % 100 %	4 % 100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	79,622,000	77,343,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		% ketersediaan RTH publik Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	4 % 100 %	0		
2	1	0	4	01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	% ketersediaan RTH publik Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	Jumlah lokasi pembuatan taman pemeliharaan taman	Terlaksananya Pengelolaan keaneekaragaman Hayati Kota Padang Panjang												2,550,000,000
						4 % 100 %	4 % 100 %	1 dokumen 1 Dokumen	3 lokasi 2 kecamatan	100 %	100 %	2,657,413,100	2,526,165,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Catatan Penting	% ketersediaan RTH publik Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	4 % 100 %	2,550,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
21105	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											58,150,000	22,701,000				115,762,500		
2110502	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											58,150,000	22,701,000				115,762,500		
21105020	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, dan Pengolahan Limbah B3	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil B3 yang dibina	terbinanya Fasyankes penghasil Limbah B3								58,150,000	22,701,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes	25 %	115,762,500		
21106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											35,851,800	14,044,050				26,500,000		
2110601	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											35,851,800	14,044,050				26,500,000		
21106013	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	Jumlah Perda yang dibuat Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	Adanya pengawasan izin terhadap usaha/kegiatan								35,851,800	14,044,050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	% 45	26,500,000		
21108	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											194,398,200	149,298,200				521,090,000		
2110801	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											194,398,200	149,298,200				521,090,000		
21108011	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	Jumlah pertemuan kader lingkungan	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kota Padang								114,399,700	114,399,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %	431,090,000		
21108013	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan Jumlah lomba kebersihan yang dilaksanakan	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kota Padang								79,998,500	34,898,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %	90,000,000		
21109	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											74,387,300	66,512,300				432,954,500		
2110901	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											74,387,300	66,512,300				432,954,500		
21109011	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	Diperolehnya penghargaan lingkungan Hidup untuk Kota Padang Panjang								74,387,300	66,512,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	2 Jenis	432,954,500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2111		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										7,880,428,350	8,283,810,154				10,738,362,400			
2111	2.01	Pengelolaan Sampah										7,880,428,350	8,283,810,154				10,738,362,400			
2111	2.01	1	1	2.0	0	1														
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah laporan pelaksanaan Jaksстрада	Terlaksananya pengelolaan Sampah															
			73 %	2 laporan	2 laporan	100 %	100 %				15,639,950	15,639,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah	73 %	17,534,000			
2111	2.01	1	1	2.0	0	3														
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	Terlaksananya pengelolaan Sampah															
			73 %	181 orang	181 orang	100 %	100 %				6,165,613,200	6,257,976,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73 %	7,105,037,700			
2111	2.01	1	1	2.0	0	4														
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	Terlaksananya pengelolaan Sampah															
			73 %	3 kali	3 kali	100 %	100 %				20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah	73 %	189,618,000			
2111	2.01	1	1	2.0	0	5														
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jenis sarana prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	Terlaksananya pengelolaan Sampah															
			73 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %				0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah	73 %	2,618,880,000			
2111	2.01	1	1	2.0	0	7														
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah TPA yang dipelihara	Terlaksananya pengelolaan Sampah															
			73 %	1 TPA	1 TPA	100 %	100 %				1,679,175,200	1,990,194,004	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah	73 %	807,292,700			
TOTAL											23,530,765,380	24,552,526,986				35,542,286,120				
1104		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1104		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
1104	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
1104	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
1104	0	1	0	2.0	0	1														
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran															
			90 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %				2,399,250	2,399,250			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	0			
1104	0	1	0	2.0	0	4														
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran															
			90 %	9 jenis	9 jenis	100 %	100 %				13,920,750	11,978,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	0			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
104165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan urusan administrasi perkantoran		90 %		2 jenis		100 %		549,000	954,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	0	
104208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											144,637,400	144,637,400				0	
104182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah rekening tagihan yang dibayarkan	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		90 %		36 rekening		100 %		33,775,000	33,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	0	
104184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		90 %		4 orang		100 %		110,862,400	110,862,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	0	
104209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											86,731,400	67,352,000				0	
104192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		90 %		2 unit		100 %		27,512,000	27,512,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	0	
104196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		90 %		4 Jenis		100 %		7,840,000	4,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	0	
104199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		90 %		1 Unit		100 %		51,379,400	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	0	
211	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2113	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											309,632,400	274,532,400				0	
211301	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											309,632,400	274,532,400				0	
11313	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	Jumlah jenis hasil uji	Jumlah Kampung Iklim yang dibina		35-32 %		2 jenis		6 Kampung		309,632,400	274,532,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	35-32 %	0	
TOTAL												557,870,200	501,853,600					0

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2022 digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup. Dokumen ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD 2022 dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang.

Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2022 selain berisi program dan rencana kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan dan indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian rencana kerja yang telah disusun.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup.

Padang Panjang, September 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004